

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam realitas politik modern tidak bisa lepas dari politik kepartaian. Partai-partai politik merupakan aktor-aktor utama di dalam sistem yang menghubungkan antara kewarganegaraan dengan proses pemerintahan. Partai dalam istilah politik juga untuk menunjukkan kekuatan politik di masyarakat, yang tidak lahir dengan mudah. Sebagaimana institusi-institusi politik lainnya, partai politik menyita waktu dan pengorbanan besar dari para pendiri dan pendukungnya sebelum ia dikenal dan diterima secara luas sebagai salah satu kelengkapan kehidupan politik manusia modern.

Khususnya di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang bahwa keberadaan partai politik menjadi bagian dari setiap aktifitas politik bangsa ini. Begitu juga dengan partai PDI Perjuangan yang lahir pada era orde baru dengan semangat perubahan karena kekangan orde baru dalam kepartaian di tanah air. PDI Perjuangan telah banyak mewarnai kehidupan politik negeri ini, mulai dari pusat hingga daerah. Artinya partai ini telah menunjukkan kekuatan politik di masyarakat, yang tentunya lahir tidak mudah dan penuh perjuangan

Partai politik menurut Ramlan Surbakti, merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif

kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.¹

PDI Perjuangan yang lahir dengan ideologi nasionalis yang dibawanya telah mampu memantapkan posisinya pada urutan tiga besar partai pemenang pemilu khususnya pada tiga periode ini. Artinya sebagai partai, PDI Perjuangan mampu mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum. Dapat dilihat pada pemilu tahun 1999 sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi.²

Tabel 1
Perolehan Suara Legislatif Tahun 1999

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi di DPR
1.	PDI Perjuangan	35.689.073	154
2.	Golkar	23.741.749	120
3.	PPP	11.329.905	59
4.	PKB	13.336.982	51
5.	PAN	7.528.956	35

Sumber: www.kpu.go.id

Pada pemilu 2004 dapat dilihat³

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana, 1992), 116

² Diakses melalui http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42, pada 21/05/2012 pk 12.00 WIB

³ Diakses melalui http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=34¬ab=4, pada 21/05/2012 pk 12.10 WIB

Tabel 2
Perolehan Suara Legislatif Tahun 2004

No. Urut Perolehan Suara	No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	20	Partai Golkar	24,480,757	21.57	128	23.27
2	18	PDI Perjuangan	21,026,629	18.53	109	19.82
3	15	PKB	11,989,564	10.57	52	9.45
4	5	PPP	9,248,764	8.15	58	10.55
5	9	Partai Demokrat	8,455,225	7.45	57	10.36

Sumber: www.kpu.go.id

Dan terakhir pada pemilu 2009 dapat dilihat⁴

Tabel 3
Perolehan Suara Legislatif Tahun 2009

No. Urut Parpol	Nama Partai	Sebelum Keputusan MK		Setelah Keputusan MK	
		Jumlah	%	Jumlah	%
31	Partai Demokrat	21,703,137	20.85	21,655,295	20.81
23	Partai Golkar	15,037,757	14.45	15,031,497	14.45
28	PDI Perjuangan	14,600,091	14.03	14,576,388	14.01
8	PKS	8,206,955	7.88	8,204,946	7.89
9	PAN	6,254,580	6.01	6,273,462	6.03

Sumber: www.kpu.go.id

⁴ Diakses melalui http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_h.pdf, pada 21/05/2012 pk 12.15 WIB

Ketika melaksanakan fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan, partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan kegiatan meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan atau eksekutif). Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas.⁵

Stabilitas sistem politik yang sedang berkembang sangat bergantung atas kekokohan partai politik yang dimiliki. Sistem kepartaian yang kokoh, mempunyai kapasitas, pertama-tama, melancarkan perluasan peran serta politik melalui jalur partai, dan dengan demikian, menguasai ataupun mengalihkan segala aktivitas politik anomik dan revolusioner. Kedua, ia mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan yang dihadapi oleh sistem politik.⁶

Dewasa ini yang tidak kalah menarik diperdebatkan adalah regenerasi elit politik yang sangat penting dalam membangun kondisi politik yang lebih baik. Dengan munculnya berbagai persoalan kader partai yang tersangkut berbagai permasalahan baik dengan internal partai, maupun sampai berurusan dengan hukum. Penting sekali untuk menilik lebih lanjut bagaimana rekrutmen politik kita saat ini, karena mau atau tidak harus diakui elit politik adalah mereka yang lahir dan dimunculkan oleh partai politik.

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 116

⁶ Samuel P Huntington, *Tertib Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 489

Dalam teori demokrasi modern, partai-partai politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Partai-partai dianggap memainkan peranan menyeluruh sebelum, selama, dan sesudah pemilu. Berbeda dengan kelompok kepentingan, partai-partai menjangkau suatu lingkup kepentingan manusia secara luas. Mereka mengidentifikasi, memilah, menentukan, dan mengarahkan pelbagai kepentingan tersebut menuju cara-cara bertindak yang dapat dipilih oleh para pemilih dan pemerintah. Partai-partai bersaing mengemukakan program-program lintas-kebijakan di dalam konteks persaingan memperebutkan pemerintahan.⁷

Kalangan ilmuwan politik seperti Robert Dahl dengan berbagai macam tulisannya, Samuel Huntington, Bingham Powell telah sepakat bahwa parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi atau tidak dalam suatu negara adalah antara lain pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilihan umum pada umumnya merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilihan umum lembaga demokrasi dapat dibentuk seperti misalnya parlemen, kekuasaan eksekutif, dan lain-lainnya.

Kemudian, setelah pemilihan umum biasanya orang akan melihat seberapa besarnya kemungkinan akan terjadinya rotasi kekuasaan. Kalau dalam sebuah negara hanya seseorang yang berkuasa secara terus-menerus, atau hanya satu partai politik yang mengendalikan roda pemerintahan secara domain dari waktu ke waktu maka di negara tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki derajat

⁷ Hans Dieter Klingemann, dkk, *Partai Kebijakan & Demokras*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2000),392-393

demokrasi yang cukup. Demokrasi memberikan peluang terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai dari seorang presiden atau perdana menteri ke yang lainnya, dari satu partai politik ke partai politik yang lainnya.

Parameter untuk mengamati demokrasi dalam sebuah negara adalah rekrutmen politik secara terbuka. Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang dan kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. Oleh karena itu, di dalam mengisi jabatan politik seharusnya peluang yang dimiliki oleh orang-orang yang memenuhi syarat adalah sama. Jadi, untuk menjadi Presiden, anggota Parlemen, Gubernur, Bupati, Walikota, bahkan Kepala Desa harus terbuka untuk semua orang, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang sudah disepakati.⁸

Hal tersebut juga telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya tentang pemerintahan daerah. Dimana gagasan untuk mempertegas pemerintahan daerah dengan memberlakukan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap penting. Undang-undang ini diterbitkan dengan salah satu isu utama yang mengedepankan demokrasi di daerah, yaitu dengan usaha untuk melakukan pemilu langsung, yang menguatkan kedaulatan rakyat secara personal.⁹

Ditambah dengan dikeluarnya UU No.12 2008 perubahan kedua atas UU No.32/2004 mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. UU No.12 2008 Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi, Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih

⁸ Syauckani HR, Afan Gaffar, M Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002),12

⁹ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2007),18

dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang diperjelas oleh ayat kedua yaitu Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.¹⁰

Hal tersebut diterapkan di semua daerah di seluruh Indonesia mulai sabang sampai merauke kecuali daerah tertentu yang mempunyai peraturan wilayah khusus seperti yang diatur dalam undang-undang. Pemilukada telah diterapkan dan diberlakukan mulai tahun 2004 sampai sekarang, begitu juga dengan Kota Surabaya yang menjadi ibukota dari Provinsi Jawa Timur. Yang menjadi parameter politik dari Jawa Timur, karena kota terbesar kedua setelah Jakarta ini menjadi kota yang tidak pernah sepi dari beragam aktifitas baik social, ekonomi, maupun politik.

Kalau kita lihat kondisi politik pada pemilu 2004 dari 45 kursi DPRD Kota Surabaya, PDIP memperoleh 13 kursi, disusul PKB 11 kursi, PAN 5 kursi,

¹⁰ Ibid,267

Demokrat 4 kursi, PKS 4 kursi, PDS 4 kursi, dan Golkar 4 kursi.¹¹ Namun pemilu 2009 PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya hanya memperoleh 8 kursi dari 50 kursi. Partai Demokrat sangat mendominasi perolehan kursi dewan, mencapai 16 kursi. PKS, PKB, dan Partai Golkar masing-masing memperoleh 5 kursi. PDS memperoleh 4 kursi, Gerindra 3 kursi, PAN 2 kursi, PKNU dan PPP masing-masing mendapat 1 kursi¹². Atau dapat dilihat dalam perolehan suara pemilu legislatif tahun 2009 di kota Surabaya yaitu:

Tabel 4
Hasil Perhitungan Suara KPU
Pemilu Legislatif 2009 Kota Surabaya Perolehan Suara Lima Besar

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara
1.	Demokrat	311.792
2.	PDI P	189.010
3.	PKS	65.385
4.	PKB	64.242
5.	GOLKAR	53.572

Sumber: KPUD Kota Surabaya

Jadi dengan kata lain dari perolehan suara pada pemilu legislatif di DPRD Kota Surabaya 3 periode kebelakang, PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang layak di perhitungkan dalam perpolitikan khususnya di Surabaya. PDI Perjuangan bisa dikatakan sebagai partai dalam urutan tiga besar teratas di Kota

¹¹ Diakses melalui <http://www.tempo.co/read/news/2009/04/28/146173170/Demokrat-Geser-Dominasi-PDIP-di-Surabaya>, pada 15/06/2012 pk 13.00 WIB

¹² Diakses melalui http://alishab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-41932-Umum-RAPUHNYA%20KURSI%20WALIKOTA%20SURABAYA%20.html, pada 15/06/2012 pukul 13.20 WIB

Surabaya. Pasti mempunyai massa pendukung dan simpatisan yang jumlahnya tidak bisa diragukan untuk memenangkan di setiap kontestasi politik yang ada.

Karena rekrutmen politik merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon pemimpin. Sebagaimana dalam setiap sistem politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian. Begitu pula dengan organisasi politik di Indonesia. Selain terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, tentu partai PDI Perjuangan juga mempunyai kualifikasi sendiri dalam melakukan rekrutmen politik.

Begitu juga dalam rekrutmen politik kepala daerah Kota Surabaya yang dilakukan khususnya oleh DPC PDI Perjuangan. Dengan proses panjang mulai ditingkatan cabang sampai keputusan DPP yang diwarnai dengan berbagai dinamika yang berkembang didalamnya. Yang juga menarik pada periode sebelumnya pemerintahan Kota Surabaya juga dimenangkan oleh calon yang diusung PDI Perjuangan. Yaitu pasangan Bambang DH dan Arif Afandi yang berhasil menang di pemilukada Kota Surabaya periode 2005-2010.

Di dalam konteks ini menjadi menarik apabila partai politik kemudian dikaitkan dengan bagaimana rekrutmen kepala daerah yang diusung yang kemudian juga akan bekerja sama dalam fungsi yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan daerah selanjutnya setelah terpilih. Dalam hal ini PDI Perjuangan dengan rekrutmen politik kepala daerah yang dilakukannya, mengingat Bambang DH yang tidak bisa dicalonkan kembali. Karena putusan Mahkamah Agung yang tidak memperbolehkan Bambang DH untuk maju kembali sebagai Kepala Daerah,

karena dianggap sudah menjabat kepala daerah dua kali pada dua periode sebelumnya.

Sehingga penelitian ini membahas tentang Rekrutmen Politik Kepala Daerah Surabaya tahun 2010 (Studi Dinamika Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah Kota Surabaya di Internal DPC PDI-P).

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian diformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah di internal DPC PDI-Perjuangan Surabaya ?
2. Bagaimana proses implementasi rekrutmen calon Kepala Daerah Kota Surabaya periode 2010-2015 oleh PDI-Perjuangan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti memformulasikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan mekanisme rekrutmen Kepala Daerah di internal DPC PDI-P Surabaya.
2. Mendiskripsikan proses penentuan calon Kepala Daerah Kota Surabaya periode 2010-2015 oleh PDIP.

1.4 Definisi Konsep

1.4.1 Dinamika

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti dinamis¹³, yang selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (group spirit) terus-menerus ada dalam kelompok itu, oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah.

1.4.2 Partai Politik

Partai politik adalah Kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.(Ramlan Surbakti,1992)¹⁴

1.4.3 Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.¹⁵ Rekrutmen politik merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan

¹³ Tim Media, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta:Media Center, 2002), 92

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 116

¹⁵ *Ibid*, 118

menjadi calon pemimpin. Dalam setiap sistem politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian. Begitu pula dengan organisasi politik di Indonesia. Selain terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tentu partai PDIP juga mempunyai kualifikasi sendiri dalam melakukan rekrutmen politik.

1.4.4 Pemilukada

Pemilukadaa ialah suatu pemilihan kepala daerah yang secara langsung oleh warga didaerah setempat. Dalam UU 32 th 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam ayat (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 57 (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.

Pemilukada secara langsung juga telah menciptakan tradisi baru di dalam perwakilan pejabat politik, yakni adanya konvensi untuk memutuskan siapa yang akan menjadi calon. Di tingkat Kabupaten/Kota, konvensi ini dilakukan oleh pengurus partai tingkat kecamatan, selain oleh pengurus ditingkat Kabupaten/Kota. Agar keputusan yang di buat oleh partai lebih demokratis, proses penentuannya acapkali dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*). Calon atau pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak biasanya yang aka diproses lebih lanjut.

Proses pencalonan di dalam PemiluKada secara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh calon yang berkualitas dan benar-benar diinginkan oleh para pemilih. Proses pencalonan ini juga mutlak dilakukan karena telah menjadi bagian dari prasyarat di dalam pendaftaran pasangan calon. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 42 ayat 2 butir b No. 6 Tahun 2005, bahwa pasangan calon yang diajukan itu harus dilengkapi “keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara penyaringannya”. Tanpa pemenuhan prasyarat demikian, pasangan calon yang diajukan itu bisa di tolak oleh KPUD.¹⁶

1.4.5 Kepala Daerah

Kepala daerah dalam UU 32 th 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Dan ayat (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

1.4.6 DPC PDI Perjuangan Surabaya

PDI Perjuangan adalah sebagai hasil fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba pada 10 Januari 1973 menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang dalam

¹⁶ Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, (Surabaya: Pustaka, 2006), 47-48

perkembangannya menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada tanggal 1 Februari 1999 menjadikan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai jati diri partai; serta gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka sebagai watak partai.¹⁷

Sedangkan DPC adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai meliputi wilayah kabupaten/ kota. Tugas dan Fungsi DPP Partai dan DPD Partai di kabupaten/ kota dilaksanakan oleh DPC Partai.¹⁸ Dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kota Surabaya adalah disebut Dewan Perwakilan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya.

1.5 Kajian Studi Terdahulu

Untuk memudahkan dalam proses penelitian penulis menggunakan kajian pustaka yang didalamnya merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat memudahkan proses pengerjaan skripsi ini, yang pada intinya untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sehingga tidak ada pengulangan. Adapun penelitian ini pernah diteliti oleh:

Riza Yulianti, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya tahun 2010, dengan judul “Mekanisme Rekrutmen Politik Partai Golkar (Rekrutmen Cawali-Cawawali di kota Surabaya tahun 2010)”. Hasil Penelitian menunjukkan, dalam melakukan rekrutmen politik partai Golkar pada Pemilu

¹⁷ Diakses melalui <http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=56> tentang Mukaddimah , pada 17/09/2012 pk 12.22 WIB

¹⁸ Diakses melalui <http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=56> tentang Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pasal 36-37, pada 17/09/1012 pk 12.22 WIB

2010, yaitu menggunakan mekanisme lembaga tim survey ketika melakukan penetapan calon Walikota atau Wakil Walikota, kemudian hasil tersebut direkomendasi oleh pusat.

Mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh partai Golkar dalam mendudukkan wakilnya di Pemilukada Surabaya 2010 ini, berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pada partai Golkar mengikuti rekrutmen politik Gabriel Almond, tentang siapa yang dicalonkan tersebut sebagai cawali/cawawli itu yang menentukan adalah para elit-elit partai. Sedangkan pola rekrutmennya menggunakan jalur birokrasi.
2. Penetapan calon yang telah ditentukan oleh elit-elit partai dan dibantu oleh lembaga survey, namun nama-nama yang terpilih ini kemudian diumumkan secara terbuka. Tetapi calon-calon ini tidak berkompetisi secara terbuka.
3. Berkaitan dengan sistem politik di Indonesia yang selalu berorientasi ke atas (*sentralisasi*), dalam melakukan rekrutmen politik selalu berusaha agar calon yang direkrut tersebut diterima oleh berbagai pihak pemerintahan, terutama warga kota Surabaya. Dalam partai Golkar calon yang direkrut harus memenuhi kriteria utamanya yaitu PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tidak tercela). Konsep PDLT ini tentunya menurut pengertian organisasi. Dan harus siap dari segi financial (calon harus memiliki pendanaan yang kuat dalam Pemilukada ini

M Saiful Hidayat, Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2008, dengan judul “Rekrutmen Kader Politik Dalam Jabatan Publik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sidoarjo menurut pasal 11 UU. No.2 tahun 2008 ditinjau dari Fiqh Siyasah”. Hasil penelitian membahas rekrutmen kader politik di PDI-P yang dikaitkan dengan pemilihan pemimpin dalam Islam dan UU. No.2 tahun 2008. Sedangkan peneliti ingin membahas pentingnya kaderisasi sebagai rekrutmen kepemimpinan politik dari partai politik, dalam hal ini penentuan calon walikota Surabaya dari PDI-P yang sekarang terpilih.

Aviva Bahasoan, Skripsi Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008, dengan judul “Dinamika Kelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Studi Kasus Penetapan Calon Gubernur Jatim 2008-2013)”. Hasil penelitian adalah proses atau tahapan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon kepala daerah Jawa Timur melalui putusan oleh DPP dalam Surat perihal khusus pilkada Propinsi Jawa Timur, dengan nomor surat 1110/I/DPP/I/2007. Secara garis besar, yang harus dilakukan oleh DPC-DPC di seluruh kota di Jawa Timur adalah melaksanakan Rakercabsus yang merupakan bagian dari Rakerdasus. Semua nama yang terjaring dalam Rakercabsus diikutsertakan dalam Rakerdasus.

DPP PDI Perjuangan kemudian yang akan menetapkan calon Gubernur dan atau Wakil Gubernur berdasarkan nama-nama hasil Rakerdasus tersebut atau atas dasar pertimbangan tertentu dan untuk kepentingan Partai secara umum, DPP Partai dapat membuat pengecualian, dengan kata lain keputusan bulat akan

ditetapkan/diputuskan oleh DPP. Namun hasil keputusan DPP yang bertolak belakang dengan hasil konvensi (Rakercabsus dan Rakerdasus), mengakibatkan munculnya aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh beberapa PAC, antara lain adalah PAC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Yang kemudian, oleh DPP dilakukan pemberian sanksi pembebasan tugas oleh DPC PDI Perjuangan kepada ranting yang tidak mematuhi putusan yang diketahui oleh DPD Partai sesuai dalam ART Pasal 14 (1).

Luki Handayani, Tesis Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga tahun 2010, dengan judul “Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Mojoketo”. Hasil Penelitian adalah terkait dengan bagaimana proses rekrutmen yang telah dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, masing-masing partai melalui tahapan yang sama. Tahapan-tahapan dalam rekrutmen terbagi 3 tahap. Pertama sertifikasi, meliputi undang-undang pemilu, aturan-aturan partai dan norma-norma sosial informal yang menentukan kriteria untuk kandidasi yang memenuhi syarat. Proses rekrutmen masing-masing partai masih mengharuskan adanya syarat informal antara lain dukungan finansial, dukungan massa, kedekatan dengan elit partai. Di sisi lain rekrutmen legislatif dilakukan dengan terbuka namun proses rekrutmen yang dilakukan berada pada sejumlah elit partai yang memiliki peran sentral di kepengurusan organisasi partai lokal.

Tahapan kedua adalah nominasi, meliputi tersedianya jabatan yang memenuhi syarat dan adanya permintaan dari selektor untuk memutuskan siapa yang dinominasikan. Nominasi atau penomoran kandidat/calon merupakan

wewenang dari elit partai politik yang bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat informal yang dimiliki oleh masing-masing calon legislatif. Dan tahap ketiga adalah pemilihan yaitu tahapan terakhir yang menentukan siapa yang menang dalam jabatan legislatif. Tidak ada perbedaan diantara kedua partai politik karena berada dalam sistem politik dan sistem pemilu yang sama.

Rully Chairul Azwar, Jurnal Politik, Jakarta/ 17 September 2008, dengan judul “Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar”. Hasil penelitian adalah program pengelolaan kader partai, yang meliputi, 1) Rekrutmen Anggota, 2) Diklat perkaderan, 3) Penugasan kader/ Rekrutmen dalam jabatan politik, 4) Penilaian Kader, merupakan program penting yang sangat menentukan sejauh mana penampilan partai dapat terlihat oleh publik. Partai Golkar memiliki Keputusan Nomor 143/ DPP/GoIkar/II/2007 yang berisikan pemantapan orientasi dan perbaikan kriteria, prosedur dan tatacara rekrutmen anggota DPR. Dalam SK DPP Partai Golkar tersebut, disusun sejumlah kriteria calon anggota legislatif yang akan diajukan sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar.

Sejumlah kriteria itu yaitu; (a) aspek pengabdian (minimal 10 tahun bagi DPR RI dan 5 tahun bagi DPRD); (b) aspek mutunya menjalankan tugas-tugas partai di daerah binaannya sebagai fungsionaris partai; (c) aspek prestasi, pengalaman dan pengaruh (dikenal dengan PD2LT-Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela); (d) aspek pendidikan formal; (e) aspek kesinambungan dan regenerasi dimana komposisi calon adalah 40 persen calon lama dan 60 persen calon baru; dan (f) aspek usia. Untuk meneliti aspek-aspek ini,

DPP Golkar membentuk Tim Tujuh dengan supervisi Ketua Umum. Masing-masing aspek memiliki bobot nilai tersendiri.

Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah diatur dalam Keputusan No-145/DPP/Golkar/II/2007 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar. Untuk menjangkir bahwa penentuan calon kepala daerah berlangsung demokratis, diatur soal hak suara untuk DPP, DPD Partai Golkar Provinsi, DPD Partai Golkar Kabupaten/ Kota dan Ormas serta organisasi sayap. Selain itu, untuk menjangkir calon Golkar selalu melakukan survei Pilkada yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar sebagai satu-satunya pedoman bagi DPP Partai Golkar dalam menyusun rekomendasi calon kepala daerah yang diprioritaskan untuk menjadi nominasi calon yang akan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Tim Pilkada Partai Golkar.

Helmi Mahadi, Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 2 Nomor, Bekasi/ 1 Februari 2011, dengan judul “Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian adalah diperlihatkan bahwa rekrutmen kandidat eksternal adalah berbasiskan perhitungan untung rugi dan lebih mengutamakan logika pasar. Akibatnya, ideologi yang jelas, program yang terstruktur, atau pendukung yang loyal tidak menjadi penentu perilaku partai politik. Ukuran kandidat yang terekrut adalah berbasis popularitas dan punya uang. Dampaknya, orang luar tidak bisa mengintegrasikan kader partai di semua level dan soliditas partai semakin terfragmentasi pada kepentingan jangka pendek dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, yakni mengatasi kelangkaan dana partai untuk menggerakkan mesin partai.

Dalam kasus Pilkada Sleman, proses rekrutmen kandidasi ditandai hilangnya peran ideologi partai dan semakin berkurangnya peran anggota partai. *Pertama*, logika politik PDI-P yang menonjol adalah pragmatisme yang dibungkus dengan ”*kapitalisasi*” politik, yakni pengorganisasian segala sumber daya untuk pemenangan Sri Purnomo dan Yuni Satya Rahayu. Cara yang digunakan adalah pola transaksional untuk memperebutkan kekuasaan, yang terlihat pada strategi PDI-P untuk memenangkannya. *Kedua*, kedaulatan kader untuk terlibat dalam seleksi kandidat semakin merosot. Akibatnya, tahapan-tahapan seleksi kandidat hanyalah bungkusan kecil pragmatisme yang seolah telah terjadi demokrasi di internal partai. Pada prinsipnya, PDI-P memutuskan merekrut *incumbent* Sri Purnomo yang merupakan calon kepala daerah yang berpotensi menang karena mempunyai modal paling kuat sekaligus mempunyai jaringan terluas memobilisasi suara.

Soetomo, Jurnal Politik, Volume XXIII No. 2, Sidoarjo/ April – Juni 2007, dengan judul “Perspektif Teoritis Model Rekrutmen Perempuan di Bidang Politik”. Hasil penelitian adalah Kemampuan perempuan dalam mengimplementasikan teori-teori tersebut merupakan kemampuan tersendiri yang tentu membutuhkan waktu dan pengalaman serta keberanian. Wacana *patriachi* yang telah berlangsung sejak adanya masyarakat manusia. Ketika manusia modern mendorong perempuan kearah apa yang telah dilakukan laki-laki dalam dunianya selama ini, maka tentu hal itu tak akan dapat dihadiahkan begitu saja kepada perempuan, kecuali harus diperebutkan oleh perempuan itu sendiri.

Jadi perspektif teoritis model rekrutmen perempuan di bidang politik ini memberi pelajaran kepada perempuan bagaimana cara merebut kekuasaan politik itu dari tangan laki-laki sesuai dengan order social sehingga mereka secara terhormat menempatkan posisi-posisi politik itu, tanpa harus menyebar issue tentang sentimen-sentimen laki-laki terhadap hak-hak perempuan modern yang saat ini terus menerus diperjuangkan.

Sitti Nur Solechah, Jurnal Politik dan Pemerintahan, Sumatra Utara/ Oktober 2009, dengan judul “Rekrutmen Politik Perempuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian adalah rekrutmen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat dan PDS dalam beberapa hal menunjukkan ada kesamaan. Kesulitan untuk merekrut perempuan bakal calon legislatif untuk memenuhi 30% didalam DCT di kedua partai tersebut disebabkan oleh berbagai alasan antara lain adalah; *pertama*, kedua partai tersebut merupakan partai baru dimana pengkaderan terhadap kader perempuan belum berjalan seperti pada partai-partai yang telah lebih dulu berdiri seperti PKS.

Alasan *kedua*, di dalam kepengurusan di tingkat provinsi, kedua partai tersebut memang mempunyai biro atau bidang kewanitaan. Tetapi di kedua partai tersebut keberadaan bidang kewanitaan hanya diatas kertas, tidak ada aktivitas dari unit tersebut. Perempuan bakal caleg yang terdaftarpun hanya sekali datang ke kantor partai untuk menyerahkan dokumen pendaftaran. Dengan hanya terpilih 16% Anggota DPRD Provinsi Sumut, menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di Provinsi Sumatera Utara belum terwakili secara proporsional. Jumlah pemilih perempuan yang diperkirakan 51% 33 dari DPT di Provinsi

Sumut belum mencerminkan bahwa perempuan diwakili perempuan. Keberadaan perempuan Sumatera Utara tidak diwakili sepenuhnya oleh perwakilan perempuan (*mirror representation*).

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif sedangkan jenis penelitian berdasarkan tempatnya menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Tujuan penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang rekrutmen kepala daerah misalnya peran elit, fungsi partai, mekanisme rekrutmen politik, sampai pada pemilihan kepala daerah. Menggunakan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁹ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berwujud kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati (*observable*). Penelitian ini dilakukan pada wilayah tertentu tempat fenomena terjadi. Dilakukan untuk memahami kejadian yang sebenarnya, serta orang yang diwawancarai adalah orang yang terlibat langsung dalam penerapan suatu kebijakan

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 5

politik partai, yang akan memberikan data berupa kata – kata tertulis berupa kesaksian mengenai fenomena tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan analisisnya pada problem yang diperoleh dari fakta empirik yang dipahami dengan rasional teoritik, dimana data dianalisis dari maknanya dan fokus pada proses dan makna suatu kejadian khususnya dalam Rekrutmen Politik DPC PDI Perjuangan dalam menentukan Calon Walikota yang diusungnya.

1.6.2 Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari informan saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian saat wawancara mendalam. Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Penentuan informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode snowball sampling. Atau yang disebut pemilihan sampel bola salju.

Prosedur pemilihan sampel bola salju dilakukan secara bertahap. Pertama, diidentifikasi anggota PDIP Surabaya yang dianggap dapat memberi informasi untuk diwawancarai (*informan*), kemudian orang ini juga dijadikan sebagai *informan* untuk mengidentifikasikan anggota DPC PDIP Surabaya sebagai *informan* yang dianggap dapat memberi informasi. Demikian proses ini berlangsung hingga terpenuhi jumlah *informan* yang dikehendaki, sampai mendapatkan informasi yang lengkap tentang

mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah Kota Surabaya di DPC PDIP Kota Surabaya²⁰ Informan diidentifikasi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: politisi PDIP, orang yang ada di struktur DPC PDIP Kota Surabaya, dan orang yang berada di luar struktur PDIP

b) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hal – hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran *online*, *browsing* data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi yang membahas mengenai rekrutmen politik

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di wilayah Surabaya, khususnya di DPC PDI-Perjuangan Surabaya. Pemilihan *setting* didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain Surabaya merupakan ibukota propinsi Jawa Timur yang memiliki keunikan tersendiri terutama mengenai dinamika politik yang selalu dinamis. Kota Surabaya juga menjadi barometer perpolitikan di Jawa Timur. Yang juga menarik adalah terjadi konflik dalam penetapan calon kepala daerah yang merupakan *non-kader* dari PDI Perjuangan sebagai partai *incumben*. Pertimbangan kedua memilih Surabaya sebagai *setting* penelitian adalah pertimbangan efisiensi waktu dan biaya yang terjangkau oleh peneliti.

²⁰ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya:2004), 273-274

1.6.4 Informan Penelitian & Unit Analisa

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dipergunakan teknik informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci (*key informan*) dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan saja.

Unit analisa adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu peristiwa sosial misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah: Struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan baik di level PAC, DPC, dan DPD. Khusus untuk informan dari struktural DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, peneliti mengambil informan dari struktural periode 2005-2010 dan periode 2010-2015.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan metode *observasi*, *In-depth interview* dan *dokumentasi*.

a. Metode *Observasi*

Metode *observasi* yaitu metode pengambilan data dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti terhadap fenomena yang ada. Lincoln dan Guba mengklasifikasikan observasi menurut tiga cara. Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan atau nonpartisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan secara terus terang (*overt*) atau penyamaran (*covert*), walaupun secara etis dianjurkan untuk berterus terang, kecuali untuk keadaan tertentu memerlukan penyamaran. Klasifikasi yang ketiga menyangkut latar penelitian. Observasi dapat dilakukan pada latar “alami” atau “dirancang” (analog dengan wawancara tak terstruktur).²¹

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang mekanisme rekrutmen politik DPC PDI-Perjuangan dan kondisi sosial politik yang bisa mempengaruhi penetapan calon Walikota Surabaya dari PDIP sebagai partai pendukung maupun kondisi politik pasca terpilih sebagai Kepala Daerah. Yang menjadi sumber data adalah hubungan kedua elit politik ini dari tahun 2010-2012 ini.

b. *In-depth interview*

In-depth interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana

²¹ Syamsuddin AR, Vismaia S. Damayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 100

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²² Tujuan dilakukan teknik ini adalah untuk mengungkap data yang sangat susah dilakukan dengan *interview* biasa, karena menyangkut informasi yang sensitif seperti menyangkut nilai, kepercayaan, maupun keyakinan.²³

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data dari berbagai sumber sampai pada suatu titik kejenuhan data. Informan yang akan diteliti menggunakan metode wawancara *in-depth interview* adalah mengidentifikasi anggota dan kader partai *non structural* dengan metode *snow ball sampling* sampai mengarahkan pada anggota *struktural* DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya atau yang menjadi kunci dalam penetapan calon walikota Surabaya dari PDIP. Materi yang digali dalam *in-depth interview* berisi tentang dinamika politik internal DPC PDIP Surabaya, proses rekrutmen calon kepala daerah kota Surabaya, dan penetapan calon Kepala Daerah kota Surabaya oleh PDIP

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumentasi dibagi menjadi dokumentasi pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan

²² Diakses melalui www.penalarn-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/431-pengertian-penelitian-kualitatif.pdf, pada 20/09/2012 pk 15.00 WIB

²³, Diakses melalui <http://www.wordpress.com/AriefDWijaya/in-depth-interview/Sesi-Metode-Pengumpulan-data>, pada 20/09/2012 pk 15.10 WIB

seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.²⁴ Dokumen jenis ini bisa berupa buku biografi tokoh yang merekam *track record* tokoh yang diteliti ataupun orang lain yang menulis biografi tokoh, buku harian, dan surat pribadi. Dokumen resmi adalah dokumen yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga masyarakat tertentu. Dokumen eksternal berupa majalah, buletin, pernyataan atau berita yang disiarkan media massa.²⁵

Dokumen yang dimaksud berupa dokumen yang mendukung penelitian rekrutmen politik DPC PDIP Surabaya dalam menentukan Calon Walikota yang diusungnya. Dokumen itu berupa AD/ART Partai, Surat Penetapan calon Kepala Daerah dari DPP PDIP, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

1.6.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data menurut Miles & Huberman yaitu analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), reduksi data (*data reduction*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing & verifying*).²⁶

²⁴Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.....,216-217

²⁵*Ibid*, 219

²⁶Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*, (Jakarta: UI-Press. 1992), 20

Display atau penyajian data ialah proses pengorganisasian untuk memudahkan data untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram dan bagan sehingga dengan begitupeneliti dapat memetakan semua data yang ditemukan dengan lebih sistematis. Penyajian menurut Miles dan Huberman merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁷ Display data ini merupakan tahapan kedua dari kegiatan analisis data, yakni menyampaikan hasil temuan penelitian kepada pembaca atau peneliti lain.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan kata lain, reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.²⁸ Reduksi data meliputi:

- a) Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
- b) Langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding adalah memberi kode pada tiap 'satuan', agar dapat ditelusuri data/satuan, sumber asal.

Verifikasi atau kesimpulan adalah perumusan kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan-temuan yang dilakukan dengan cara mensintesis semua

²⁷ Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*, 17

²⁸ Tjetjep R.R., *Analisis Data Kualitatif Terjemahan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16

data yang terkumpul. Langkah-langkah penganalisan selama pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. setiap selesai pengumpulan data, semua catatan lapangan dibaca, dipahami dan dibuatkan ringkasannya;
2. semua catatan- catatan lapangan dan semua ringkasan yang telah dibuat, dibaca lagi dan dibuatkan ringkasan-ringkasan sementara, yaitu ringkasan hasil yang mensintesis apa yang telah diketahui tentang masalah penelitian yang dijadikan latar penelitian, dan menunjukkan apa yang masih harus diteliti.
3. setelah seluruh data yang diperlukan telah selesai dikumpulkan dan peneliti meninggalkan lapangan penelitian, maka catatan lapangan yang telah dibuat selama pengumpulan data dianalisis lebih lanjut secara lebih intensif. Kemudian, terakhir adalah perumusan kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan-temuan sementara yang dilakukan dengan cara mensintesis semua data yang terkumpul.

1.6.7 Metode Keabsahan Data

Di dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Keakuratan data dilakukan dengan uji keabsahan data melalui uji silang hasil observasi dengan informan, termasuk dengan informan dan dokumentasi penelitian.

1. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Dengan cara²⁹:
2. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi untuk pengumpulan data dan memastikan tercatat dalam catatan harian wawancara dan observasi.
3. Melakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian wawancara dan observasi apabila tidak relevan maka dilakukan konfirmasi perbedaan itu dengan informan.
4. Hasil konfirmasi itu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya karena bisa jadi hasil konfirmasi itu bertentangan dengan informasi-informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau sumber-sumber lain. Apabila ada yang berbeda, peneliti terus menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai peneliti menemukan sumber perbedaan dan materi perbedaan, kemudian dikonfirmasi dengan informan dan sumber-sumber lain.

Proses triangulasi tersebut dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan atau mengalami suatu titik jenuh dalam pengambilan data yang berarti dalam pengambilan data yang diperoleh tetap sama, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan.

²⁹ H M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 252